

**PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM
PERGANTIAN ANTAR WAKTU DI DESA TALUMAE KECAMATAN WATANG
SIDENRENG**

Muh. Arif Rezki Ananda K¹, Irwan², Sofyan B³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: zholick11ananda@gmail.com

Email: irwanirwan41083@gmail.com; sofyanofi@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the Village Head Election Process is held during Inter-Time Changes in Talumae Village, Watang Sidenreng District. This research uses descriptive qualitative methods. Participants were selected using a purposive sampling technique with 7 informants as data sources. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation with data processing and analysis techniques using Nvivo 12 software. The results of the research show, This research found that the process of selecting village heads over time in Talumae Village succeeded in implementing the principles of local democracy in depth. . The results of the analysis show that the two main dimensions of democracy according to Robert Dahl, namely liberalization (through open and competitive public contestation) and inclusiveness (with broad participation from various levels of society), are implemented well. Actors such as the Chair of the Village BPD, the PAW Village Election Implementation Committee, the District Head, and the Village Government are actively involved in ensuring political freedom without discrimination and equal participation, building legitimacy and public trust in the election process. High transparency in each stage also increases public monitoring and legitimacy of election results.

Keywords: Village Head Election, Interim Change, Local Democracy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Pergantian Antar Waktu Di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan 7 informan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Software Nvivo 12. Hasil penelitian menunjukkan, Penelitian ini menemukan bahwa proses pemilihan kepala desa pergantian antar waktu di Desa Talumae berhasil menerapkan prinsip-prinsip demokrasi lokal secara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua dimensi utama demokrasi menurut Robert Dahl, yaitu liberalisasi (melalui kontestasi publik yang terbuka dan kompetitif) dan inklusivitas (dengan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat), terimplementasi dengan baik. Aktor-aktor seperti Ketua BPD Desa, Panitia Pelaksana Pilkades PAW, Camat, dan Pemerintah Desa terlibat secara aktif untuk memastikan adanya kebebasan politik tanpa diskriminasi dan partisipasi yang merata, membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Transparansi yang tinggi dalam setiap tahapan juga meningkatkan pemantauan publik dan legitimasi terhadap hasil pemilihan.

Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa, Pergantian Antar Waktu, Demokrasi Lokal.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Sehingga

proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila.

Pemerintahan desa adalah salah satu tingkatan pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat. Di banyak negara, pemerintah desa memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya lokal, pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga desa, dan pengembangan infrastruktur serta layanan dasar. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu aspek penting dalam tata pemerintahan desa, karena melalui Pilkades, warga desa memiliki kesempatan untuk pemimpin lokal yang akan mewakili dan mengurus kepentingan mereka. Tetapi dalam sebuah kasus, Pilkades mengalami beberapa situasi yang tak terduga, yaitu pemilihan kepala desa pergantian antar waktu.

Pembaruan dalam prosesi pemilihan kepala desa muncul setelah terbitnya regulasi tentang Pilkades antar waktu. Istilah ini baru dikenal sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perihal kepala desa yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka diselenggarakan Pilkades antar waktu melalui musyawarah desa. Pemilihan Kepala Desa pergantian antar waktu dapat terjadi karena berbagai hal, seperti pengunduran diri, diskualifikasi, pemecatan, atau kematian kepala desa terpilih sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini seringkali menimbulkan sebuah masalah dalam tata kelola pemerintah desa. Proses pemilihan yang dilakukan harus memerlukan perhatian khusus dan berbeda dengan pilkades seperti biasanya.

Desa Talumae merupakan desa pertama penyelenggara pemilihan kepala desa pergantian antar waktu di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah diterbitkannya peraturan Bupati Sidenreng Rappang No 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa Talumae sebelumnya meninggal dunia dengan sisa masa jabatan 3 (Tiga) Tahun. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menjadi hal baru di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng.

Terdapat hal yang menarik dari Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) ini, terutama di Desa Talumae Watang Sidenreng karena terdapat Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan pejabat kepala desa Talumae sebelumnya yang meninggal dunia pada akhir Februari 2022 lalu. Antusiasme partisipasi politik masyarakat desa sangat positif dimana dari 111 peserta musyawarah desa, 111 orang hadir yang mengartikan bahwa seluruh peserta turut hadir dalam menyalurkan hak pilihnya. Artinya bahwa kompetisi yang tersaji dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu tetap berlangsung ketat dan sengit. Para calon kepala desa akan bersaing keras untuk menduduki jabatan kepala desa. Para calon Kepala Desa akan bersaing keras untuk menduduki jabatan Kepala Desa.

Persaingan untuk merebutkan jabatan kepala desa selalu di ikuti dengan kompetisi yang penuh ambisi. Hal tersebut sangatlah wajar terjadi, mengingat jabatan kepala desa menjadi hal yang eksklusif dalam strata sosial Masyarakat Desa. Akses politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu terbuka lebar. Pasalnya musyawarah desa kini telah berubah menjadi forum yang sifatnya strategis. Banyak Keputusan penting dalam Pemilihan Kepala Desa yang dihasilkan melalui forum musyawarah desa. Persaingan dari para calon kepala desa berlangsung semakin ketat. Praktik lobi politik, kampanye hingga money politic dimungkinkan terjadi, mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang menghiasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Demokrasi local merupakan bagian dari subsistem politik suatu Negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia Demokrasi local merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Menurut Robert Dahl, mengungkapkan bahwa demokrasi tidak boleh melibatkan unsur emosi akan tetapi menggunakan akal sehat. Pemikiran Dahl terhadap demokrasi menandai bergulirnya babak baru pemikiran tentang demokrasi. Demokrasi akal sehat identic dengan demokrasi yang dipromosikan Negara Negara barat dalam hal ini Amerika Serikat.

Robert Dahl menyatakan bahwa karakteristik utama demokrasi adalah respon berkelanjutan dari pemerintah terhadap preferensi masyarakatnya yang dianggap setara secara politik. Robert Dahl

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



menyederhanakan system yang demokratis dengan menggunakan dua variabel : (1) Kebebasan dalam kontestasi public; (2) partisipasi public dalam politik. Menurut Robert Dahl, dalam proses demokratisasi terdapat paling sedikit dua dimensi, yaitu Liberarisasi (kontestasi public) dan inklusivitas (hak untuk berpartisipasi dalam politik). Jadi, dalam proses demokratisasi, wajar jika proses pembuatan keputusan politik melibatkan kalangan yang luas dan terbentuk kelompok-kelompok yang memiliki ide yang bertentangan.

Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah.

Kedua, pemilihan secara langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, walikota, atau bupati, dan hingga di tingkat desa. Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak.

Ketiga, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Demokrasi lokal bertujuan untuk memperkenalkan ciri khas masing-masing daerah, yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dengan sebutan kesatuan berbangsa. Demokrasi lokal sudah menjadi kawasan geopolitik para tokoh-tokoh daerah yang ingin menjadi pemimpin masa depan tanah asalnya. Menimbang semua wacana, melihat dengan kedekatan indikator dan kecerdasan dalam menentukan pilihan-pilihan politik untuk di perjuangkan menjadi pemimpin lokal yang benar-benar diterima oleh rakyat pada umumnya. Ruang kongkrit yang menjadi mentalitas para pemimpin lokal untuk diwujudkan dalam penantian dan harapan-harapan besar bagi masyarakat sekitarnya.

METODE

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini penulis menggunakan jenis data primer sebagai data utama. Berdasarkan sumber perolehan, data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari tempat penelitian. Menurut (Fauzy, 2019), Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Peneliti memilih sumber yang menjadi tujuan penelitian, yaitu DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Desa Talumae, BPD Desa Talumae, Panitia Penyelenggara Pilkades PAW Desa Talumae, Tokoh Masyarakat Desa Talumae. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pemanfaatan aplikasi Nvivo 12 Plus..

PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang berjudul Proses Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Talumae, peneliti telah mengeksplorasi dinamika dan mekanisme pemilihan kepala desa yang terjadi di tengah masyarakat Desa Talumae. Berdasarkan data yang diperoleh, grafik crosstab query yang ditampilkan memberikan wawasan mendalam mengenai cara berbagai aktor berperan dalam proses ini, serta bagaimana mereka menyeimbangkan antara prinsip inklusivitas dan liberalisasi. Teori Demokrasi Lokal yang dikemukakan oleh Robert Dahl menjadi fondasi teoritis yang saya gunakan untuk menganalisis fenomena ini. Demokrasi lokal, menurut Dahl, merupakan subsistem politik yang beroperasi dalam kerangka pemerintahan daerah, di mana pengaruh dan dinamika politik daerah sangat menentukan keberhasilan demokrasi di tingkat nasional. Di Indonesia, demokrasi lokal memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan hubungan yang erat dan responsif dengan rakyat di wilayahnya. Dalam konteks Desa Talumae, proses pemilihan kepala desa pergantian antar waktu (PAW) menjadi manifestasi dari praktik demokrasi lokal ini.

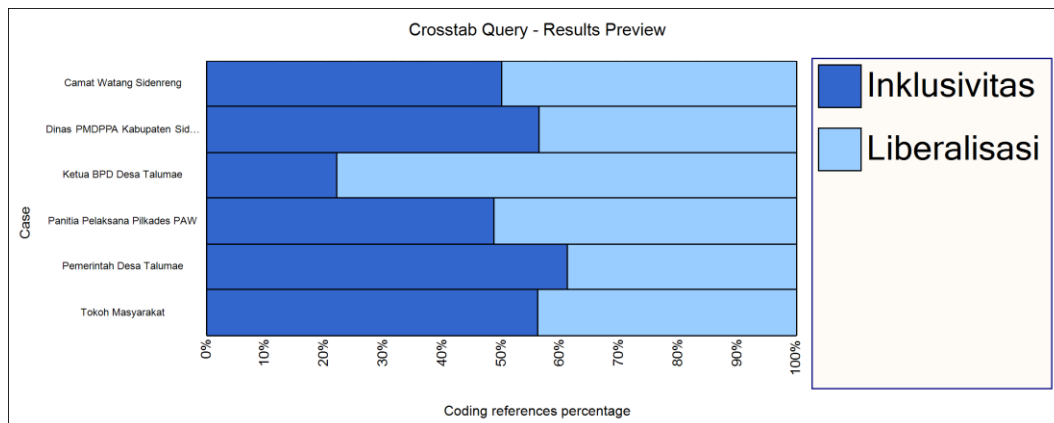
Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Gambar: 1. Perbandingan Visualisasi Diagram



Robert Dahl menegaskan bahwa demokrasi seharusnya berjalan berdasarkan akal sehat dan rasionalitas, bukan emosi. Pemikiran Dahl menandai pergeseran penting dalam pemahaman tentang demokrasi, menekankan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem politik yang mampu merespon preferensi masyarakat secara berkelanjutan. Dahl menyederhanakan konsep demokrasi menjadi dua variabel kunci: kebebasan dalam kontestasi publik dan partisipasi publik dalam politik. Dimensi pertama, liberalisasi, mencakup kebebasan individu dan kelompok untuk bersaing dan berkompetisi dalam arena politik. Dimensi kedua, inklusivitas, mengacu pada hak dan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Grafik crosstab query yang disajikan mengungkapkan bagaimana berbagai aktor di Desa Talumae menekankan aspek-aspek ini secara berbeda. Misalnya, Camat Watang Sidenreng dan Panitia Pelaksana Pilkades PAW menunjukkan tingkat inklusivitas yang tinggi. Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk memastikan bahwa proses pemilihan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari tingkat bawah hingga ke atas, dengan tujuan menciptakan keputusan yang representatif dan adil. Mereka berusaha untuk memperluas partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda untuk didengar dan dipertimbangkan.

Di sisi lain, beberapa aktor seperti Ketua BPD Desa Talumae lebih menekankan pada aspek liberalisasi. Ini terlihat dari bagaimana mereka mempromosikan kebebasan dalam kontestasi publik, mendorong persaingan yang sehat dan terbuka antara calon kepala desa. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara demokratis, dengan adanya kompetisi yang adil dan transparan.

Keseimbangan antara inklusivitas dan liberalisasi yang ditunjukkan dalam grafik ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diuraikan oleh Dahl. Dalam proses demokratisasi, penting untuk melibatkan sebanyak mungkin individu dalam pembuatan keputusan politik, sambil tetap mempertahankan kebebasan untuk bersaing dalam arena politik. Hal ini memungkinkan terciptanya lingkungan politik yang dinamis, di mana berbagai ide dan pandangan dapat diutarakan dan dipertimbangkan.

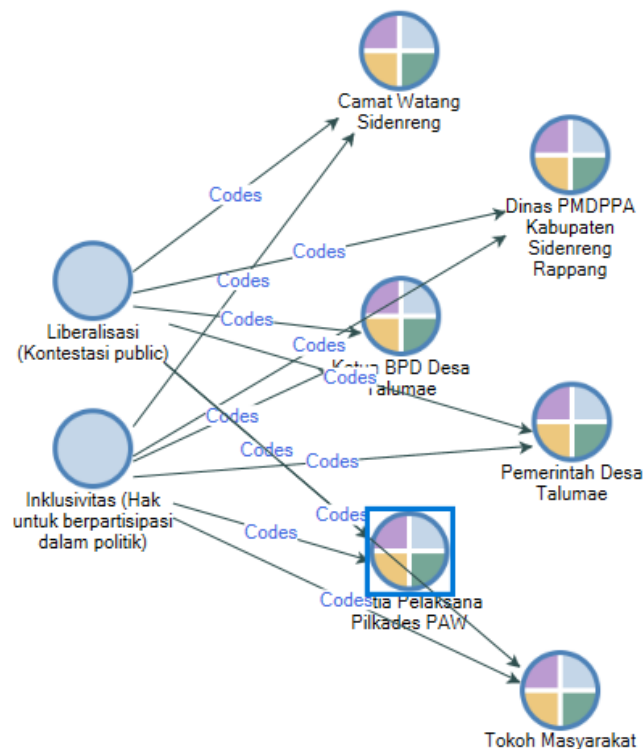
Dalam konteks Desa Talumae, proses pemilihan kepala desa PAW menunjukkan bagaimana teori demokrasi lokal dapat diterapkan dalam praktik. Proses ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar calon kepala desa, tetapi juga sebagai arena partisipasi publik yang luas. Partisipasi yang tinggi dari berbagai kelompok masyarakat mencerminkan upaya untuk menciptakan keputusan politik yang inklusif dan representatif. Selain itu, kompetisi yang sehat antar calon menunjukkan bahwa prinsip liberalisasi juga diterapkan dengan baik, memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan.

Lebih lanjut, analisis ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi di tingkat lokal dapat menjadi cermin bagi dinamika politik di tingkat nasional. Pengalaman Desa Talumae dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan demokrasi lokal yang kuat dan sehat. Partisipasi

publik yang tinggi dan kebebasan dalam kontestasi politik adalah elemen kunci yang harus dijaga untuk memastikan bahwa demokrasi lokal dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang proses pemilihan kepala desa di Desa Talumae tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana teori demokrasi lokal dapat diterapkan dan diadaptasi dalam konteks lokal. Dinamika antara inklusivitas dan liberalisasi yang ditunjukkan oleh berbagai aktor dalam proses ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara partisipasi publik dan kebebasan politik dalam upaya membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2. Project Map



Teori Demokrasi Lokal, menurut Robert Dahl, adalah bagian integral dari subsistem politik suatu negara yang berada dalam lingkup pemerintahan daerah. Demokrasi lokal di Indonesia memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk membangun hubungan yang erat dengan masyarakat setempat, memungkinkan responsivitas yang lebih besar terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat. Robert Dahl menekankan bahwa demokrasi harus didasarkan pada akal sehat, bukan emosi, dan mencerminkan respons berkelanjutan pemerintah terhadap preferensi masyarakat yang dianggap setara secara politik. Dahl menyederhanakan konsep demokrasi menjadi dua variabel utama: kebebasan dalam kontestasi publik (liberalisasi) dan partisipasi publik dalam politik (inklusivitas).

Project Map yang ditampilkan menggambarkan hubungan antara berbagai aktor di Desa Talumae dengan dua konsep utama ini. Setiap aktor berperan dalam menyeimbangkan antara liberalisasi dan inklusivitas, yang merupakan inti dari proses demokratisasi yang digambarkan oleh Robert Dahl.

Camat Watang Sidenreng, misalnya, berkontribusi signifikan terhadap baik liberalisasi maupun inklusivitas. Camat ini memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa PAW berlangsung dengan kebebasan yang cukup bagi calon untuk berkompetisi secara adil, sambil juga memastikan bahwa seluruh warga desa memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik ini. Hal ini

menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kebebasan kontestasi publik dengan hak partisipasi politik yang luas.

Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang juga memainkan peran penting dalam mendukung kedua dimensi ini. Mereka mendorong kebebasan politik dan kontestasi publik, yang penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan bersifat kompetitif dan adil. Pada saat yang sama, mereka berusaha untuk memastikan bahwa semua warga desa, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik, mencerminkan prinsip inklusivitas yang ditekankan oleh Dahl.

Ketua BPD Desa Talumae lebih menekankan pada liberalisasi, memastikan bahwa kebebasan kontestasi publik terjaga dengan baik. Ini terlihat dari dukungan mereka terhadap kompetisi yang sehat dan terbuka dalam proses pemilihan. Namun, mereka juga tidak mengabaikan pentingnya inklusivitas, meskipun fokus utama mereka adalah pada liberalisasi.

Pemerintah Desa Talumae menunjukkan keseimbangan yang baik antara kedua dimensi ini. Mereka mendukung kebebasan dalam kontestasi politik, memastikan bahwa pemilihan berjalan secara adil dan transparan. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk memastikan inklusivitas, memberikan hak partisipasi yang setara bagi semua warga desa.

Panitia Pelaksana Pilkades PAW adalah aktor kunci lainnya yang berkontribusi terhadap kedua dimensi ini. Mereka memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan kompetisi yang sehat dan terbuka, sementara juga memastikan bahwa setiap warga desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik ini. Upaya mereka mencerminkan komitmen untuk menciptakan proses pemilihan yang demokratis dan inklusif.

Tokoh masyarakat juga berperan penting dalam mendukung baik liberalisasi maupun inklusivitas. Mereka mendorong kebebasan politik dan kontestasi publik, sambil juga memastikan bahwa hak partisipasi politik dijamin bagi seluruh warga desa.

Dalam konteks Desa Talumae, proses pemilihan kepala desa PAW menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi lokal yang dikemukakan oleh Robert Dahl dapat diterapkan dalam praktik. Proses ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar calon kepala desa, tetapi juga merupakan arena partisipasi publik yang luas. Partisipasi yang tinggi dari berbagai kelompok masyarakat mencerminkan upaya untuk menciptakan keputusan politik yang inklusif dan representatif. Selain itu, kompetisi yang sehat antar calon menunjukkan bahwa prinsip liberalisasi juga diterapkan dengan baik, memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan.

Melalui project map ini, kita dapat melihat bagaimana berbagai aktor bekerja sama untuk menyeimbangkan antara liberalisasi dan inklusivitas, menciptakan lingkungan politik yang dinamis dan responsif. Hal ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara partisipasi publik dan kebebasan politik dalam upaya membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang proses pemilihan kepala desa di Desa Talumae tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana teori demokrasi lokal dapat diterapkan dan diadaptasi dalam konteks lokal.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Proses Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Talumae mengeksplorasi secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip demokrasi lokal, seperti yang diuraikan oleh Robert Dahl, diterapkan dalam konteks pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Talumae. Melalui analisis yang cermat, penelitian ini menemukan bahwa kedua dimensi utama demokrasi menurut Dahl, yaitu liberalisasi (kontestasi publik) dan inklusivitas (hak untuk berpartisipasi dalam politik), berhasil diimplementasikan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam proses pemilihan ini. Proses pemilihan kepala desa di Desa Talumae menunjukkan keseimbangan antara liberalisasi dan inklusivitas. Dimensi liberalisasi tercermin dalam upaya berbagai aktor, seperti Ketua BPD Desa Talumae dan Panitia Pelaksana Pilkades PAW, yang memastikan kebebasan dan kompetisi yang sehat, serta mendukung kebebasan politik tanpa hambatan atau diskriminasi. Sementara itu, dimensi inklusivitas terlihat dari komitmen Camat Watang Sidenreng dan Pemerintah Desa Talumae untuk memastikan partisipasi luas dari semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



ekonomi, atau politik. Proses ini membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan, mencerminkan prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

REFERENSI

- Adnan, M. (2021). Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1), 95–110. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.199>
- Anwar, A. S. (2019). Kepala Desa Di Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019. *E-Journals Unigal Repositori*, 1(1), 437–450.
- Arfawati, A. (2021). Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 84-94.
- Bancin, M. H. (2011). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat). *Journal of Regional and City Planning*, 22(3), 179. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.3.2>
- Disanto, E. (2019). *ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Emilda, F. (2011). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2–20.
- Fitria, N. A. (2021). *Penerapan peraturan bupati Lombok Tengah tentang pergantian antar waktu Kepala Desa tahun 2019 di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Haluana'a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 46–52. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i1.180>
- Jamaluddin, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Gava Media.
- Junaidi, K., & Lestari, T. (2021). Peran Keakerabatan dalam Pemenagan Pemilihan Kepala Desa Menjalain Tahun 2018. *Jurnal Sociopolitico*, 3(2), 88-96.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Pramesti, M. W. (2009). Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia. *Gema Eksos*, 4(2), 716–734.
- Rahayu¹, S., & Dewi, D. S. K. (2018). Evaluasi Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Evaluation*, 3(02).
- Ramadani. (2009). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang. *Gema Eksos*, 4(2), 716–734.
- Rodhiya, S., & Harir, M. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 291–300.
- Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 1.
- Rusfiana, Y. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021. 9(1), 36–42.
- Saputra, A. Y., & Yanto, R. (2015). E-Voting Berbasis Web dan Wap dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Musi Rawas. *J. Sisfo*, 5(3), 187-192.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>
- Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 4 Juni 2024

- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598–606.
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>
- Zaini, Z., Huda, M. N., & Nafilah, Q. (2023). Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Karena Meninggal Dunia Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 1-10.